



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 14 Januari 2022  
**Kepala Dinas,**

**Hj. RAHMAWATY, ST, MT**  
NIP. 19710726 199703 2 005

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021**

**A. Sumber Pendanaan tahun 2021 sejumlah Rp. 13.047.520.802 dengan rincian**

- APBD : Rp. 13.047.520.802  
(termasuk d belanja gaji dan tunjangan)
- Realisasi Keuangan : Rp. 10.611.479.312 (81,33%)
- Realisasi Fisik Kegiatan : 95%
- Sisa anggaran : Rp. 2.436.041.490

**B. Hasil Pelaksanaan**

- Terlaksananya Kegiatan Radio Talkshow Bupati Menjawab
- Terlaksananya Rapat PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)
- Terlaksananya peliputan Kegiatan Pemkab Hulu Sungai Selatan
- Tersedianya Berita Kegiatan Pemkab Hulu Sungai Selatan, baik dimedia sosial maupun media cetak
- Terlaksananya Siaran Tunda Hari Jadi Kab. Hulu Sungai Selatan pada Media Televisi Lokal Kalsel
- Terlaksananya Kegiatan Dialog Pembangunan Pemkab Hulu Sungai Selatan
- Tersedianya Adventorial Pemkab Hulu Sungai Selatan pada media cetak/ surat kabar
- Tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan Statistik Sektoral. Buku tersebut dibagikan ke Kecamatan dan Instansi lainnya.
- Terlaksananya kegiatan pelatihan Statistik Sektoral.
- Tersedianya Jaringan Intra Fiber Optik Pemerintah Daerah yang menghubungkan beberapa SKPD dan Fasilitas Publik di Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Tersedianya Aplikasi yang mendukung administrasi maupun pelayanan Pemkab HSS, diantaranya :
  - 1) Satu NIK (Aplikasi Data Kesehatan, Pendidikan, Sosial by name by adres)
  - 2) Si Open (Aplikasi Pengadaan)
  - 3) Aplikasi Esakip
  - 4) Aplikasi Satu Data Kabupaten
  - 5) Aplikasi Geoportal
- Terlaksananya layanan Tanda Tangan Elektronik untuk pejabat Pemkab HSS
- Terlaksananya Aplikasi Esurat / Srikandi Kearsipan (Tahap Ujicoba dari Arsip Nasional RI)
- Tersedianya CCTV publik pada 10 titik persimpangan jalan yang dapat diakses oleh publik melalui website.
- Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Menara Komunikasi Seluler

### **C. Permasalahan Dalam Realisasi**

- Sisa anggaran pada kegiatan Pengadaan Intra Pemerintah dikarenakan selisih harga antara pagu dengan RAB Real yang lebih diefisienkan, sehingga biaya real lebih rendah dari pagu anggaran.
- Pengadaan Server batal dilaksanakan karena tidak tersedianya vendor/ penyedia di ekatalog, sehingga metode pengadaan diganti dengan tender dan mengalami keterlambatan administrasi pada pengadaan tender.
- Sisa anggaran pada kegiatan Rapat, Pelatihan dan Sosialisasi dikarenakan sebagian Anggaran Makan Minum, Alat Tulis dan Fotokopi tidak direalisasikan, karena diadakan melalui Virtual via zoom.
- Anggaran Perjalanan Dinas Peliputan Kegiatan Pejabat di Luar daerah Sebagian tidak direalisasikan karena tidak dilakukan kegiatan di Luar daerah tidak didampingi KRU peliputan dan Wartawan, disebabkan pandemi Covid 19.
- Terdapat beberapa kegiatan yang jumlah pesertanya dikurangi dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.
- Terdapat beberapa kegiatan seperti pembelian BBM, pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan tidak habis direalisasikan karena disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan.

### **D. Tindak Lanjut**

- Perhitungan Gaji pada penganggaran Gaji dan Tunjangan berikutnya perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPKPD sehingga sisa anggaran tidak begitu besar.
- Untuk Belanja barang maupun modal pada Tahun berikutnya dilaksanakan pada awal tahun, sehingga realisasi / pelaksanaan dapat terlaksananya sebagaimana mestinya.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	1
D. Struktur Organisasi.....	2
E. Peran dan Isu Strategis.....	14
F. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
A.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	27
A.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020.....	29
A.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir renstra (tahun 2023).....	30
A.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar Nasional.....	30
B. Analisis Capaian Kinerja.....	31
C. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
D. Realisasi Anggaran.....	57
E. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	61
F. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2020.....	62
F. 1 Evaluasi Kinerja Tahun 2020.....	62
F. 2 Tindak Lanjut.....	63
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
A. Tindak Lanjut.....	64

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	17
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra Sebelum penyesuaian .....	19
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra Setelah penyesuaian .....	19
Tabel 2.4 Kesesuaian Visi Misi Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	28
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 .....	28
Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 .....	29
Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir renstra (tahun 2023).....	30
Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar Nasional .....	30
Tabel 3.6 Data Desa Blankspot dan Tidak Blankspot .....	33
Tabel 3.7 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
Tabel 3.8 Produsen Data daerah yang terintegrasi dengan simpul jaringan kabupaten .....	41
Tabel 3.9 Aplikasi layanan pemerintahan yang tersedia .....	42
Tabel 3.10 Menara Telekomunikasi Seluler yang ada di Kabupaten hulu Sungai Selatan .....	45
Tabel 3.11 Perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah .....	45
Tabel 3.12 Layanan keamanan informasi.....	56
Tabel 3.13 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.....	56
Tabel 3.14 Dokumen Keuangan.....	45
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran.....	57
Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya .....	57

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS.....	13
Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	29
Gambar 3.2 Grafik Nilai Indeks SPBE Kab. Hulu Sungai Selatan ....	32
Gambar 3.3 Grafik Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 .....	41
Gambar 3.4 Tampilan situs cctv public Pemkab HSS.....	45
Gambar 3.5 Tampilan layar depan aplikasi Srikandi .....	45
Gambar 3.6 Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler.....	50
Gambar 3.7 Website yang memuat informasi publik.....	52
Gambar 3.8 Website yang di monitoring.....	53
Gambar 3.9 Website Media Elektronik Mitra Strategis yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dan Nasional.....	53
Gambar 3.10 Media Cetak Mitra Strategis Yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan Dan Program Prioritas Nasional.....	54
Gambar 3.11 Gambar portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	55
Gambar 3.12 Pelatihan Produsen Data untuk Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	55
Gambar 3.13 Buku statistik yaitu Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Statistik Daerah.....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Untuk melaksanakan transparansi publik dalam mengelola tata pemerintah yang baik, pemerintah menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan. Pengelolaan e-Government diperuntukkan untuk G2G (Government to Government), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Citizen). Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2021 kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja, disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj).

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic selama Tahun 2021, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes.

#### **C. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Untuk melaksanakan transparansi publik dalam mengelola tata pemerintahan yang baik, pemerintah menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan.



Pengelolaane-Government diperuntukkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri tahun 2017, yang dulunya merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sesuai peraturan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas;

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Struktur Organisasi**

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, dan 6 (enam) Seksi, serta Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

## 1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

### 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

#### 1.2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

- d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

### 1.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## 2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- b. penyusunan program operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

### 2.1. Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan dan Penguatan melaksanakan monitoring, menghimpun, menganalisa dan mengelola data opini, aspirasi, pengaduan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat terutama di media massa dan elektronik;
- b. melaksanakan monitoring informasi di media publik dan menyiapkan bahan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- c. menganalisa dan melaksanakan manajemen komunikasi krisis yang ada di masyarakat;

- d. menganalisa media komunikasi yang tepat sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan dialog komunikasi publik;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan konten komunikasi informasi publik dari pemerintah melalui media luar ruangan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana publikasi dan komunikasi publik milik pemerintah;
- g. melaksanakan penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah sebagai media komunikasi publik;
- h. melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan asistensi pelaksanaan pengklasifikasian informasi publik dan kajian atas dampak serta konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

## 2.2. Seksi Pelayanan Informasi Publik.

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- b. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan layanan informasi publik dan hubungan media publikasi;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan bahan informasi, berita dan hasil pembangunan untuk dipublikasikan pada media publikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengemasan ulang konten konten nasional menjadi konten dan pembuatan konten lokal;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengolahan dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. melaksanakan desiminasi informasi dan pelayanan informasi publik melalui media massa dan elektronik;

- g. melaksanakan kemitraan dan layanan hubungan media, wartawan atau kalangan pers dalam rangka peliputan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah;
- h. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan, masyarakat dan komunitas guna mendukung pelayanan informasi publik pemerintah daerah;
- i. menyusun program dan menentukan jenis-jenis siaran pada televisi dan radio publikasi pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- k. menyiapkan dan mengolah bahan penjelasan, tanggapan dan keterangan pers;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

### 3. Bidang Persandian dan Statistik :

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- b. penyusunan program persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- d. pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian dan Statistik terdiri :

#### 3.1 Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengawasan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Persandian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;
- d. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
- e. melaksanakan pencatatan dan agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- h. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- i. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- j. melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;
- k. menyiapkan bahan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengamanan informasi pada pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Persandian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

### 3.2 Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Statistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan survey, kompilasi produk administrasi maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelenggarakan statistik sektoral;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral;



- e. menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan statistik sektoral;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

#### 4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- b. Penyusunan program pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- c. Koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),

- pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

#### 4.1 Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika

Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan layanan infrastruktur TIK yang meliputi jaringan intra pemerintah daerah, pusat data dan system penghubung layanan menuju *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
- b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan intra Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pusat data Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sistem penghubung layanan (*message bus services*) aplikasi dan data Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Command Center Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menuju Kabupaten *Smart City*;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi menara telekomunikasi;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan infrastruktur TIK;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai bidang tugas.

#### 4.2 Seksi Aplikasi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika

Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan layanan aplikasi SPBE, Pengelolaan Pusat Data, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), layanan sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah, Integrasi layanan aplikasi publik dan pemerintahan menuju *Smart City*.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan layanan aplikasi SPBE;
- c. melaksanakan pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta kerjasama teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pemberdayaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- g. mengelola domain, sub domain, portal dan *website* Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai bidang tugas.

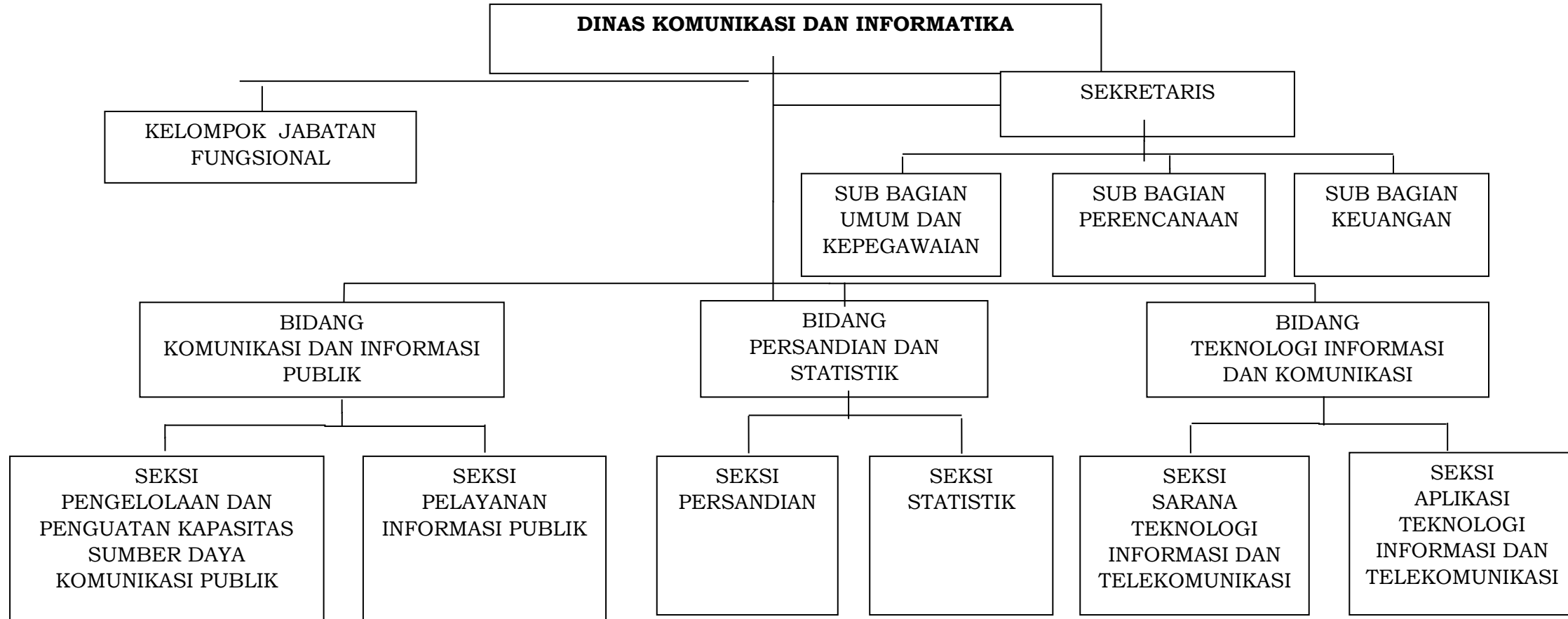
#### 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam Gambar berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. HSS

## **E. Peran dan Isu Strategis**

Dinas Komunikasi dan Informatika beeran strategis dalam berbagai permasalahan strategis antara lain:

### **1) Kurangnya SDM TIK**

SDM bidang TIK masih tersebar diberbagai perangkat daerah, sementara untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika mengangkat pegawai outsourcing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diperlukan peningkatan kemampuan melalui diklat/bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika.

### **2) Infrastruktur Telekomunikasi**

Walaupun telekomunikasi bukan merupakan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyambung masyarakat akan kebutuhan akses telekomunikasi di daerah sangat dirasakan. Tidak semua desa tercover jaringan telekomunikasi dikarenakan kondisi geografis terdiri dari wilayah gunung dan rawa dan penyebaran penduduk tidak merata. Melalui koordinasi dan komunikasi dengan para penyelenggara telekomunikasi berkaitan dengan layanan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain penyampaian usulan penambahan dan peningkatan sinyal tower bts, menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan untuk dilakukan perbaikan.

### **3) Infrastruktur e-Government**

Tidak semua OPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhubung dengan akses internet, jikapun terhubung dengan akses internet hanya menggunakan akses internet Vsat dengan bandwidth yang terbatas dan biaya sewa akses internet yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan menyewa akses internet Fiber Optik. Akses internet masih berdiri sendiri di masing-masing instansi/OPD dan masih banyak instansi/OPD yang belum tersedia akses internet. Dengan dibangunnya jalur/jaringan e-Government Pemkab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahap I pada tahun ini yang menghubungkan beberapa instansi Pemerintah yang ada di ibukota Kabupaten dalam satu jaringan intranet dan internet (jaringan e-Government) mampu memenuhi kebutuhan komunikasi dan pengelolaan data antar instansi.

### **4) Aplikasi e-Government**

Tidak semua aplikasi Pemerintah Pusat dapat terintegrasi dengan aplikasi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi pengaduan yang bersinergikan dengan media sosial serta tersajikan di dashboard bagi masyarakat, pengelola pengaduan dan pimpinan. Sebagian besar aplikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten belum berbasis web dan mobile. Belum tersedianya aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

- 5) **Regulasi**  
Masih adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika yang masih tersebar di berbagai perangkat daerah sehingga masih terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Perumusan regulasi daerah yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi beeran penting dalam mengoptimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 6) **Statistik Sektoral**  
Masih belum optimalnya penyelenggaraan urusan statistik sektoral dimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah belum sepenuhnya dilaksanakan. Kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data yang tidak saja menjadi rujukan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Untuk itu diperlukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga ketika di release, masyarakat dapat dengan mudah memahami, namun kurangnya SDM yang menangani urusan statistik juga menjadi kendala terhadap terlambatnya informasi yang direlease melalui website.
- 7) **Persandian**  
Pelaksanaan urusan persandian belum dilaksanakan secara optimal selain masalah SDM persandian yang tidak ada, ditambah lagi dengan peralatan dan regulasi yang belum mendukung di pemerintah daerah.
- 8) **Komunikasi dan Informasi Publik**  
Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi, media luar ruang, internet, radio, koran, dan media lainnya. Namun demikian, penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berbenah untuk peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan penambahan konten-konten yang menarik diwebsite maupun media sosial pemkab maupun website Diskominfo, peningkatan mutu berita/artikel yang terupdate dan release berita yang tepat waktu. Untuk menjangkau daerah yang belum terakses internet, melalui “Bupati Menjawab” merupakan kerjasama dengan Radio Lokal dengan sasaran terkelolanya informasi dan opini publik yang sedang viral dan berkembang di media kepada masyarakatdengan baik sehingga masyarakat pada akhirnya mendapatkan informasi yang benar dan akurat (bukan informasi hoak) sehingga opini yang berkembang dapat menjadi informasi berguna untuk masyarakat.

## **F. Sistematika Penyajian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menyajikan penjelasan umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta Permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2019-2023 beserta penyesuaian terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, dan
2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

- **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2021 dan rekomendasi Untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan. Disamping itu pula, diharapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1 Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat		
Misi 5	: Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan 5	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas Informasi pemerintah daerah	Meningkatkan penggunaan Sistem Berbasis elektronik dan meningkatkan kualitas dan kualitas pendukungnya	Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah
2	Meningkatkan kualitas Informasi pemerintah daerah	Meningkatkan penggunaan Sistem Berbasis elektronik untuk melaksanakan keterbukaan informasi public dan meningkatkan keamanan datanya	Mengingkatkan pengelolaan informasi publik dan keamana informasi

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri



dan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2020-2024 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dilakukan penyesuaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengampu urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung pencapaian misi kelima Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis”.

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra sebelum Penyesuaian

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Komunikasi dan Informatika	Nilai/Predkat
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik
Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi
Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Rasio berita positif dan negatif di media massa tentang Kabupaten HSS
Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Dokumen statistik yang tersedia
		%Pengamanan informasi daerah

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Renstra Sesudah Penyesuaian

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>
Meningkatkan jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
		Persentase Desa yang bebas blankspot
Meningkatkan kualitas Informasi pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas Informasi pemerintah daerah	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial

		Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman
--	--	---

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam JMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah . Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 2.4. Kesesuaian Visi Misi Kepala Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA JMD						KONDISI AKHIR		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.												
1	Meningkatkan jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	-	-	2,49	2,49	2,69	2,90	3,51	3,51
			Persentase Desa yang bebas blankspot	Persen	-	-	74,32	74,32	79,72	89,89	100	100
2	Meningkatkan kualitas Informasi pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas Informasi pemerintah daerah	Persentase Berita Positif Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial	Persen	-	-	80	80	100	100	100	100
			Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan Daerah dalam kondisi aman	Persen	-	-	20	50	60	85	100	100

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	2,69	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.210.400.000
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.528.800.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	100.000.000
							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.155.320.000
							Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	605.800.000
							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	60.120.000
		Persentase Desa yang bebas blanks pot	Persen	79,72				

							Pemerintah Daerah	
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial	Persen	100	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	31.200.000
							Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	10.745.000
							Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	513.516.000
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	71.400.000
							Pelayanan Informasi Publik	493.400.000
							Layanan Hubungan Media	180.000.000
							Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	284.000.000
							Manajemen Komunikasi Krisis	50.750.000
							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	424.082.000
							Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	36.000.000
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.700.000.000
					Program Penelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	45.789.000

							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	29.028.000
		Persen tase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	Persen	100	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
3	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HSS	Nilai / Predikat AKIP	Nilai	83,79	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.125.000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.420.194.352
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.500.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.125.000
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.125.000

					Administra si Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	2.257.100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.100.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.807.600
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.388.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	13.500.000
						Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.175.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		606.320.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		25.357.750	
				Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasio nal atau Lapangan	75.027.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.800.000	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.644.000	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>							<b>13.047.520.8 02</b>



Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 diimplementasikan melalui 5 (lima) program yaitu :

- 1) Program Aplikasi Informatika, merupakan program yang berisi kegiatan pelaksanaan penyediaan akses internet untuk perangkat daerah, pengembangan infrastruktur e-government berupa pusat data, pengembangan aplikasi e-government, serta pengembangan kota cerdas.
- 2) Program Informasi Dan Komunikasi Publik, kegiatan yang dilaksanakan meliputi peliputan kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Penyajian Informasi pada website, media social, media televisi, media cetak, radio dan media baliho.
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan Buku Statistik dan Pelatihan Produsen Data untuk Perangkat Daerah.
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, kegiatan meliputi penyediaan layanan keamanan informasi berupa layanan Tanda Tangan Elektronik dan Pengamanan Surat melalui Aplikasi.
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan penunjang kesekretariatan berupa penyediaan alat dan jasa penunjang kedinasan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### A.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung visi dan misi Bupati.

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukurannya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

➤ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

➤ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

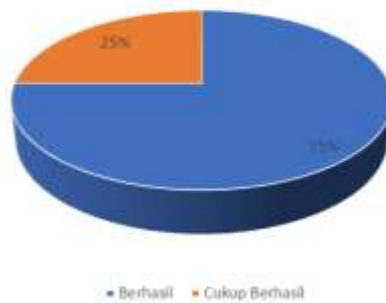
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 100\%$	Berhasil
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil
4	$< 40\%$	Tidak Berhasil

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKT
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	Perhitungan Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) PERMEPAN RB NO 59 Tahun 2020	2,69	2,49	92,57	Cukup berhasil
2		Persentase Desa yang bebas blankspot	Persen	Jumlah Desa yang sudah terkoneksi jaringan internet dibagi dengan seluruh desa di Kab. Hulu Sungai Selatan dikali 100	79,72	79,72	100	Berhasil
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial	Persen	Jumlah Berita Positif mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dibagi Seluruh jumlah Berita mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dikali 100	100	100	100	Berhasil
4		Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	Persen	Jumlah Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dalam kondisi aman dibagi jumlah seluruh Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dikali 100	60	60	100	Berhasil
<b>RATA - RATA CAPAIAN</b>							<b>98,14</b>	<b>Berhasil</b>

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021



Gambar 3.1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2021

## A.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	Perhitungan Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) PERMEPAN RB NO 59 Tahun 2020	2,49	2,49
2		Persentase Desa yang bebas blankspot	Persentase	Jumlah Desa yang sudah terkoneksi jaringan internet dibagi dengan seluruh desa di Kab. Hulu Sungai Selatan dikali 100	74,73	79,72
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial	Persentase	Jumlah Berita Positif mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dibagi Seluruh jumlah Berita mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dikali 100	100	100
4		Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	Persentase	Jumlah Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dalam kondisi aman dibagi jumlah seluruh Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dikali 100	50	60

### A.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan dengan target akhir renstra (tahun 2023)

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir renstra (tahun 2023) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir renstra (tahun 2023)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	Perhitungan Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) PERMEPAN RB NO 59 Tahun 2020	2,49	3,51	70,94
2		Persentase Desa yang bebas blankspot	Persentase	Jumlah Desa yang sudah terkoneksi jaringan internet dibagi dengan seluruh desa di Kab. Hulu Sungai Selatan dikali 100	79,72	100	79,72
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial	Persentase	Jumlah Berita Positif mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dibagi Seluruh jumlah Berita mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dikali 100	100	100	100
4		Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	Persentase	Jumlah Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dalam kondisi aman dibagi jumlah seluruh Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dikali 100	60	100	60

### A.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan akhir Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	Perhitungan Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) PERMEPAN RB NO 59 Tahun 2020	2,49	Tidak ada data	
2		Persentase Desa yang bebas blankspot	Persentase	Jumlah Desa yang sudah terkoneksi jaringan internet dibagi dengan seluruh desa di Kab. Hulu Sungai Selatan dikali 100	79,72	Tidak ada data	
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial	Persentase	Jumlah Berita Positif mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dibagi Seluruh jumlah Berita mengenai Pemkab Hulu Sungai Selatan di media cetak, media elektronik dan media sosial dikali 100	100	Tidak ada data	
4		Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	Persentase	Jumlah Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dalam kondisi aman dibagi jumlah seluruh Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan dikali 100	60	Tidak ada data	

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

### a) Indeks SPBE

Capaian Nilai Indeks SPBE memakai nilai Evaluasi pada Tahun 2019 karena pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan Evaluasi SPBE oleh MenPANRB karena pandemic covid 19 dan untuk tahun 2021 tidak bisa mengikuti Evaluasi SPBE. Domain dan Aspek Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 Menteri PANRB adalah sebagai berikut :

Nama Instansi

**Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

K/L/D : Kabupaten

Daerah : Kalimantan  
: Selatan

**Indeks SPBE : 2.49**

Predikat SPBE : Cukup

**Domain Kebijakan SPBE : 2.18**

➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.57

➔ Kebijakan Layanan SPBE : 1.9

**Domain Tata Kelola : 2.29**

➔ Kelembagaan : 3.00

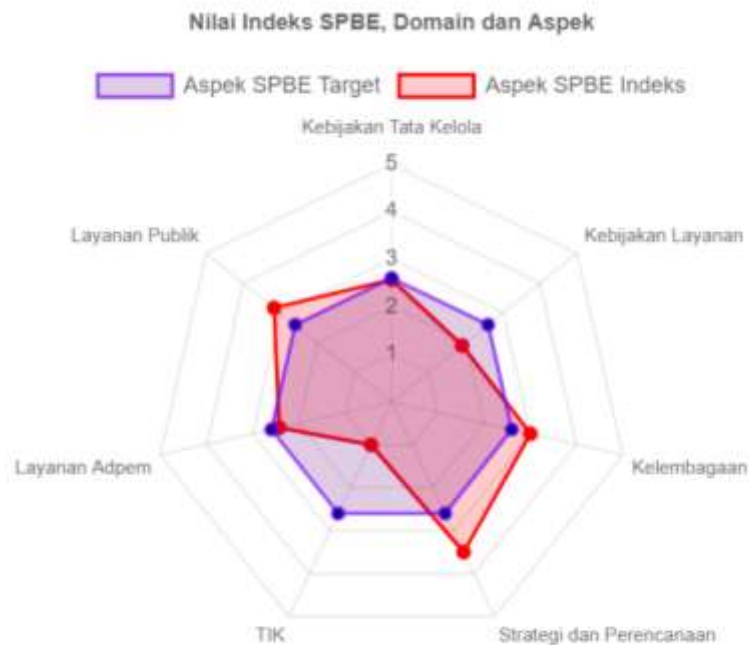
➔ Strategi dan Perencanaan : 3.5

➔ TIK : 1.00

**Domain Layanan SPBE : 2.7**

➔ Administrasi Pemerintahan : 2.43

➔ Pelayanan Publik : 3.17



Gambar 3.2 Grafik Nilai Indeks SPBE Kab. Hulu Sungai Selatan

Target Indikator Indeks SPBE sebesar 2.69, diakhir tahun 2020 Realisasi Kinerja sebesar 2.49, dengan demikian predikat SPBE berada diposisi Cukup. Adapun target periode akhir Renstra (2023) sebesar 3,51 sehingga realisasi indeks SPBE pada tahun 2020 telah menyumbang sebesar 74,94 % untuk capaian periode akhir Renstra 2023.

Faktor kegagalan sasaran ini adalah :

1) Belum adanya Regulasi Masterplan Smart city dan Arsitektr SPBE;

Upaya perbaikan :

- 1) Pengembangan pusat data di daerah
- 2) Integrasi Sistem Aplikasi

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Membuat Regulasi Masterplan Smart city dan Arsitektr SPBE

## 2. Persentase Desa yang bebas blankspot

Pada tahun 2021 desa/kelurahan yang dapat mengakses internet/ bebas blankspot sebesar 79,72 % yaitu 114 Desa/Kelurahan dari 144 Desa / Kelurahan. Pada tahun 2021 desa bebas blankspot bertambah dari tahun 2020 (74,73%) dikarenakan peningkatan layanan oleh penyedia jasa telekomunikasi melalui koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan bantuan akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Program KPU/USO. Terdapat peningkatan jumlah tower/BTS yang pada akhir tahun 2020 berjumlah 98 menjadi 100 tower/BTS pada akhir 2021. Adapun Rincian Data Blankspot desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Data Desa Blankspot dan Tidak Blankspot

No.	Kecamatan	Desa	Ket	No	Kecamatan	Desa	Ket
1	Sungai Raya	Hamalau	Stabil	73	Simpur	Simpur	Tidak Stabil
2	Sungai Raya	Telaga Bidadari	Stabil	74	Simpur	Garunggang	Stabil
3	Sungai Raya	Karasikan	Stabil	75	Simpur	Amparaya	Stabil
4	Sungai Raya	Sungai Raya Utara	Stabil	76	Simpur	Panjampang Bahagia	Stabil
5	Sungai Raya	Sungai Raya Selatan	Stabil	77	Simpur	Ulin	Stabil
6	Sungai Raya	Hariti	Stabil	78	Simpur	Pantai Ulin	Stabil
7	Sungai Raya	Ida Manggala	Stabil	79	Simpur	Wasah Hulu	Tidak Stabil
8	Sungai Raya	Bumi Berkat	Tidak Ada	80	Simpur	Wasah Tengah	Stabil
9	Sungai Raya	Batang Kulur Kiri	Tidak Stabil	81	Simpur	Wasah Hilir	Stabil
10	Sungai Raya	Batang Kulur Tengah	Stabil	82	Simpur	Kapuh	Tidak Stabil
11	Sungai Raya	Batang Kulur Kanan	Tidak Stabil	83	Daha Selatan	Muning Baru	Stabil
12	Sungai Raya	Baru	Tidak Stabil	84	Daha Selatan	Muning Dalam	Stabil
13	Sungai Raya	Tamiyang	Tidak Ada	85	Daha Selatan	Muning Tengah	Stabil
14	Sungai Raya	Asam	Tidak Ada	86	Daha Selatan	Banjarbaru	Stabil
15	Sungai Raya	Sungai Kali	Tidak Stabil	87	Daha Selatan	Bayanan	Stabil
16	Sungai Raya	Sarang Halang	Ada	88	Daha Selatan	Pandan Sari	Stabil
17	Sungai Raya	Paring Agung	Tidak Stabil	89	Daha Selatan	Pihanin Raya	Stabil
18	Sungai Raya	Tanah Bangkang	Stabil	90	Daha Selatan	Tumbukan Banyu	Stabil
19	Padang Batung	Karang Jawa Muka	Stabil	91	Daha Selatan	Sungai Pinang	Stabil



20	Padang Batung	Karang Jawa	Stabil	92	Daha Selatan	Habirau	Stabil
21	Padang Batung	Tabihi	Stabil	93	Daha Selatan	Habirau Tengah	Stabil
22	Padang Batung	Pandulangan	Stabil	94	Daha Selatan	Parigi	Stabil
23	Padang Batung	Kaliring	Stabil	95	Daha Selatan	Banua Hanyar	Stabil
24	Padang Batung	Jambu Hulu	Stabil	96	Daha Selatan	Tambangan	Stabil
25	Padang Batung	Pahampangan	Stabil	97	Daha Selatan	Baruh Jaya	Stabil
26	Padang Batung	Padang Batung	Stabil	98	Daha Selatan	Samuda	Stabil
27	Padang Batung	Jembatan Merah	Stabil	99	Daha Utara	Pakapuran Kecil	Stabil
28	Padang Batung	Batu Bini	Tidak Stabil	100	Daha Utara	Panggandingan	Stabil
29	Padang Batung	Mawangi	Tidak Ada	101	Daha Utara	Tambak Bitin	Stabil
30	Padang Batung	Madang	Tidak Ada	102	Daha Utara	Pakan Dalam	Stabil
31	Padang Batung	Durian Rabung	Stabil	103	Daha Utara	Paramaian	Stabil
32	Padang Batung	Jelatang	Stabil	104	Daha Utara	Pandak Daun	Stabil
33	Padang Batung	Batu Laki	Tidak Stabil	105	Daha Utara	Murung Raya	Tidak Ada
34	Padang Batung	Malutu	Tidak Stabil	106	Daha Utara	Balah Paikat	Stabil
35	Padang Batung	Malilingin	Tidak Ada	107	Daha Utara	Sungai Garuda	Stabil
36	Telaga Langsung	Lok Binuang	Stabil	108	Daha Utara	Sungai Mandala	Stabil
37	Telaga Langsung	Telaga Langsung	Stabil	109	Daha Utara	Mdl. Murung Mesjid	Stabil
38	Telaga Langsung	Mandala	Stabil	110	Daha Utara	Baruh Kembang	Stabil
39	Telaga Langsung	Ambutun	Stabil	111	Daha Utara	Teluk Haur	Stabil
40	Telaga Langsung	Hamak	Tidak Ada	112	Daha Utara	Pasungkan	Stabil
41	Telaga Langsung	Hamak Timur	Tidak Stabil	113	Daha Utara	Teluk Kabak	Stabil
42	Telaga Langsung	Hamak Utara	Tidak Ada	114	Daha Utara	Hamayung	Stabil
43	Telaga Langsung	Pakuan Timur	Stabil	115	Daha Utara	Hamayung Utara	Stabil
44	Telaga Langsung	Gumbil	Stabil	116	Daha Utara	Paharangan	Stabil
45	Telaga Langsung	Longawang	Stabil	117	Daha Utara	Hakurung	Tidak Stabil
46	Telaga Langsung	Pandulangan	Stabil	118	Kalumpang	Balimau	Tidak Stabil
47	Angkinang	Bamban Utara	Stabil	119	Kalumpang	Karang Paci	Tidak Stabil
48	Angkinang	Bamban	Stabil	120	Kalumpang	Bago Tanggul	Tidak Stabil
49	Angkinang	Bamban Selatan	Stabil	121	Kalumpang	Karang Bulan	Tidak Stabil
50	Angkinang	Kayu Abang	Stabil	122	Kalumpang	Balanti	Tidak Stabil
51	Angkinang	Angkinang	Stabil	123	Kalumpang	Kalumpang	Stabil
52	Angkinang	Telaga Sili-Sili	Stabil	124	Kalumpang	Tambingkar	Stabil
53	Angkinang	Angkinang Selatan	Stabil	125	Kalumpang	Sirih	Stabil

54	Angkinang	Tawia	Tidak Stabil
55	Angkinang	Taniran Kubah	Tidak Stabil
56	Angkinang	Taniran Selatan	Tidak Stabil
57	Angkinang	Bakarung	Stabil
58	Kandangan	Gambah Luar	Stabil
59	Kandangan	Gambah Luar Muka	Stabil
60	Kandangan	Gambah Dalam	Stabil
61	Kandangan	Gambah Dalam Barat	Tidak ada
62	Kandangan	Sungai Kupang	Stabil
63	Kandangan	Bangkau	Stabil
64	Kandangan	Lungau	Tidak Ada
65	Kandangan	Sungai Paring	Stabil
66	Kandangan	Bariang	Stabil
67	Kandangan	Amawang Kiri	Stabil
68	Kandangan	Amawang Kiri Muka	Stabil
69	Kandangan	Amawang Kanan	Stabil
70	Kandangan	Tibung Raya	Stabil
71	Kandangan	Baluti	Stabil
72	Simpur	Tebing Tinggi	Stabil

126	Kalumpang	Sirih Hulu	Stabil
127	Loksado	Halunuk	Tidak Ada
128	Loksado	Panggungan	Tidak Ada
129	Loksado	Lumpangi	Tidak Ada
130	Loksado	Malinau	Tidak Ada
131	Loksado	Hulu Banyu	Tidak Ada
132	Loksado	Tumingki	Tidak Ada
133	Loksado	Kamawakan	Tidak Ada
134	Loksado	Lok Lahung	Tidak Ada
135	Loksado	Loksado	Tidak Stabil
136	Loksado	Haratai	Tidak Ada
137	Loksado	Ulang	Tidak Ada
138	Daha Barat	Siang Gantung	Stabil
139	Daha Barat	Baru	Stabil
140	Daha Barat	Tanjung Selor	Stabil
141	Daha Barat	Badaun	Stabil
142	Daha Barat	Bajayau	Stabil
143	Daha Barat	Bajayau Tengah	Stabil
144	Daha Barat	Bajayau Lama	Stabil

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Persentase Desa yang bebas blankspot yaitu Program Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp 5.660.440.000,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 4.718.130.721,- atau sebesar 83,35 %.

Faktor Keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan bantuan akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Program KPU/USO.

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Meningkatkan koordinasi yang dilakukan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Program KPU/USO untuk memenuhi target 100 persen desa bebas blankspot
3. Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial  
Capaian 100 persen merupakan perhitungan dari 1.145 berita Pemkab yang ditayangkan di media cetak maupun elektronik keseluruhannya merupakan berita positif. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk

mendukung indikator ini yaitu program informasi dan komunikasi publik dengan anggaran sebesar Rp 3795093000,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 3.511.628.009,- atau sebesar 92,53 %, dan program penyelenggaraan statistik sektoral dengan anggaran sebesar Rp 74.817.000,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp 66.677.000,- atau sebesar 83,35 %.

Faktor Keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun pihak swasta yang terlibat dalam pekerjaan bersama.
- 2) Kerjasama yang baik dengan seluruh PPID pembantu dalam menunjang kelancaran Sosialisasi dan pelatihan PPID;

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Lebih meningkatkan pelatihan untuk PPID pembantu

4. Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman

Capaian 60 persen data atau informasi dalam kondisi aman bertambah dari tahun 2021 sebesar 50 persen, karena pemanfaatan aplikasi mail sanapati sehingga penyelenggaraan persandian pada pemerintah Kabupaten/Kecamatan dapat berjalan dengan optimal guna mendukung tata kelola untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah baik dalam pengiriman, penerimaan berita/informasi rahasia berklarifikasi melalui email secara cepat, tepat dan aman. Adapun anggaran untuk program yang mendukung indikator ini dihapus karena adanya refocusing untuk covid 19.

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Adanya aplikasi sanapati untuk pengamanan informasi / mail dari pusat aatau instansi lain
- 2) Adanya koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk pemanfaatan Tanda Tangan elektronik

Upaya perbaikan :

- 1) Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pelatihan keamanan Informasi;
- 2) Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian operasional persandian dan keamanan informasi kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Tindak lanjut yang akan datang :

- 1) Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pelatihan keamanan Informasi
- 2) Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian operasional persandian dan keamanan informasi kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### C. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.7 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Utama	program	indikator program	Target 2021	Realisasi	Capaian 2021	Predikat
Indeks SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Produsen Data daerah yang terintegrasi dengan simpul jaringan kabupaten	25.64	25.64	100,00	Berhasil
		Persentase Fasilitas Publik di Kabupaten HSS yang bebas blankspot	53.84	53.84	100,00	Berhasil
	pengelolaan e government di lingkup pemerintah daerah kabupatenkota	Jumlah Aplikasi layanan pemerintahan yang tersedia	32	32	100,00	Berhasil
		Service level agreement (SLA) Pusat Data Pemerintah Daerah	99.671	99.691	100,02	Berhasil
	pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pusat data	1	1	100,00	Berhasil
	pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibuat	32	32	100,00	Berhasil
	pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupatenkota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kota Cerdas	1	1	100,00	Berhasil
	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Data Aplikasi	1	1	100,00	Berhasil
	Persentase Desa yang bebas blankspot	pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler yang diawasi sesuai standar	100	100	100,00
pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupatenkota		Jumlah menara selular yang beroperasi sesuai standar	100	100	100,00	Berhasil
		Jumlah perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	11	11	100,00	Berhasil
penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah		Jumlah Unit yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10	10	100,00	Berhasil
Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan keterbukaan Informasi Publik	66,67	66,67	100,00	Berhasil
		Persentase Kegiatan Pemda yang diberitakan tepat waktu	100	100	100,00	Berhasil
	pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah website perangkat daerah yang memuat informasi publik	26	26	100,00	Berhasil

dan media sosial	pemerintah daerah kabupatengkota	Media Sosial perangkat daerah yang memuat informasi publik	26	26	100,00	Berhasil
		Persentase Laporan masyarakat melalui media elektronik yang ditanggapi tepat waktu	100	100	100,00	Berhasil
		Persentase Laporan masyarakat melalui media elektronik yang ditanggapi tepat waktu	100	100	100,00	Berhasil
	monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Kegiatan Bupati Menjawab yang Dilaksanakan	48	48	100,00	Berhasil
	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli untuk Memenuhi Standar Minimal Broadcasting	6	6	100,00	Berhasil
	penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Sudah Melaksanakan Urusan KIP Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	27	27	100,00	Berhasil
	monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah yang di Monitoring	26	26	100,00	Berhasil
	manajemen komunikasi krisis	Jumlah Kegiatan Dialog Pembangunan yang Terlaksana	1	1	100,00	Berhasil
	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	800	1.145	143,13	Berhasil
	pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Kerja Sama Dengan Mitra Siaran Sebagai Media Komunikasi Publik	17	17	100,00	Berhasil
	pelayanan informasi publik	Jumlah Media Elektronik Mitra Strategis yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dan Nasional	12	12	100,00	Berhasil
	layanan hubungan media	Jumlah Jurnalis Mitra Kerja Yang Terlayani	10	10	100,00	Berhasil
	kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Liputan berita Terpublikasi	800	1.145	143,13	Berhasil
	penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Media Cetak Mitra Strategis Yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan Dan Program Prioritas Nasional	5	5	100,00	Berhasil
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	31.75	31,75	100,00	Berhasil
	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupatengkota	Jumlah Produsen data sesuai SDI	39	39	100,00	Berhasil
		Jumlah Sistem informasi Data Statistik sesuai SDI	1	1	100,00	Berhasil
	peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah Pelatihan Statistik Sektoral	1	1	100,00	Berhasil

	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen HSS dalam angka, Kecamatan dalam angka dan Statistik daerah	2	2	100,00	Berhasil
Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tata kelola Keamanan Informasi yang dilaksanakan dengan status baik	50	50	100,00	Berhasil
	penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupatenkota	Jumlah layanan Keamanan informasi sesuai standar	1	1	100,00	Berhasil
	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupatenkota	Jumlah pelatihan keamanan informasi yang diikuti	1	1	100,00	Berhasil
	penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupatenkota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas tim pengamanan informasi kabupaten	1	1	100,00	Berhasil
	pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupatenkota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah sarana dan prasarana SOC	1	1	100,00	Berhasil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	100	100	100,00	Berhasil
		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	100	100,00	Berhasil
	perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Kominfo Kab. hSS yang berkualitas	15	15	100,00	Berhasil
	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100,00	Berhasil
	evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	10	10	100,00	Berhasil
	administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai standar	5	5	100,00	Berhasil
	penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100,00	Berhasil
	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00	Berhasil

koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulana nsemesteran skpd	laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang memenuhi aspek kualitas	3	3	100,00	Berhasil
penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan atau Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang memenuhi aspek kualitas	1	1	100,00	Berhasil
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas KOMinfo Kab. HSS yang memenuhi aspek kualitas	1	1	100,00	Berhasil
administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Bulan pelayanan Administrasi Umum sesuai dengan kebutuhan	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100,00	Berhasil
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100,00	Berhasil
Daya Air dan Listrik penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100,00	Berhasil
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100,00	Berhasil
penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100,00	Berhasil

operasional atau lapangan					
pemeliharaanrehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100,00	Berhasil
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12	12	100,00	Berhasil



Gambar 3.3 Grafik Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

1. Capaian indikator program aplikasi informatika

a) Persentase Produsen Data daerah yang terintegrasi dengan simpul jaringan kabupaten

Capaian Indikator Persentase Produsen Data daerah yang terintegrasi dengan simpul jaringan kabupaten sebesar 25,64 merupakan jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah atau SKPD yang menerapkan Aplikasi yang databasenya terintegrasi dengan database lain di pusat data pemkab Kab. Hulu Sungai Selatan sebanyak 11 SKPD dari 39 SKPD. Adapun rincian 11 SKPD tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.8 Produsen Data daerah yang terintegrasi dengan simpul jaringan kabupaten

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	terhubung dengan jaringan intra
2.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	terhubung dengan jaringan intra



3.	Inspektorat	terhubung dengan jaringan intra
4.	Sekretariat Dewan	terhubung dengan jaringan intra
5.	Dinas Perhubungan	terhubung dengan jaringan intra
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terhubung dengan jaringan intra
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	terhubung dengan jaringan intra
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Bridjen H. Hasan Basry Kandangan	terhubung dengan jaringan intra
9.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	menerapkan aplikasi dengan database terintegrasi
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	menerapkan aplikasi dengan database terintegrasi
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	terhubung dengan jaringan intra

- b) Persentase Fasilitas Publik di Kabupaten HSS yang bebas blankspot  
 Capaian Indikator Persentase Fasilitas Publik di Kabupaten HSS yang bebas blankspot sebesar 53,84 merupakan jumlah Fasilitas public yang memiliki akses internet sebanyak 7 fasilitas publik dari 13 Fasilitas public yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.1 Capaian Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan pengelolaan e government di lingkup pemerintah daerah kabupatenkota adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Aplikasi layanan pemerintahan yang tersedia

Tabel 3.9 Aplikasi layanan pemerintahan yang tersedia

NO	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI	ALAMAT URL
1	DASHBOARD REALISASI APBD	Aplikasi / Sistem Informasi yang berisi tentang data dan informasi Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://dashboar.d.hulusungaiselatankab.go.id">https://dashboar.d.hulusungaiselatankab.go.id</a>
2	DICEK	Aplikasi / Sistem Informasi yang berisi tentang data dan informasi Istilah dan Artikel dalam pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan	<a href="https://dicek.hulusungaiselatankab.go.id">https://dicek.hulusungaiselatankab.go.id</a>
3	SATU DATA HSS	portal Katalog Open Data Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan data dengan format data terbuka	<a href="https://data.hulusungaiselatankab.go.id">https://data.hulusungaiselatankab.go.id</a>
4	E-JADWAL	Aplikasi / Sistem Informasi pengelolaan Jadwal Pejabat dan Tempat Rapat	<a href="https://ejadwal.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://ejadwal.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>

5	EMS / ELEKTRONIK MONITORING SYSTEM	Aplikasi / Sistem Informasi untuk memonitoring realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	<a href="https://ems.hulusungaiselatankab.go.id">https://ems.hulusungaiselatankab.go.id</a>
6	ESAKIP	Sistem Informasi Pelaporan Akuntabilitas Pemerintah	<a href="https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id">https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id</a>
7	UPG	Aplikasi layanan unit pengendalian gratifikasi secara online	<a href="https://upg.hulusungaiselatankab.go.id">https://upg.hulusungaiselatankab.go.id</a>
8	ETRACKING	Aplikasi / Sistem Informasi untuk mengelola dan mentracking progres surat yang masuk/ diproses oleh pejabat (surat masuk, pentanda tanganan surat, telaahan staf, dll)	<a href="https://etracking.hulusungaiselatankab.go.id">https://etracking.hulusungaiselatankab.go.id</a>
9	WBS	Merupakan Aplikasi Layanan histleblowing System secara online	<a href="https://wbs.hulusungaiselatankab.go.id">https://wbs.hulusungaiselatankab.go.id</a>
10	GEOPORTAL	Aplikasi pemetaan perencanaan/usulan kegiatan pembangunan	<a href="https://geoportal.hulusungaiselatankab.go.id">https://geoportal.hulusungaiselatankab.go.id</a>
11	INFO RESMI COVID-19	Aplikasi / Sistem Informasi yang berisi tentang data dan informasi Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://corona.hulusungaiselatankab.go.id">https://corona.hulusungaiselatankab.go.id</a>
12	INTAN	Sistem Informasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berbasis Website pada Bagian Protokol dan Kehumasan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://intan.hulusungaiselatankab.go.id">https://intan.hulusungaiselatankab.go.id</a>
13	JADWAL KRU	Aplikasi / Sistem Informasi pengelolaan jadwal dan pelaporan penugasan Kru Peliputan HSS TV	<a href="https://jadwalkru.hulusungaiselatankab.go.id">https://jadwalkru.hulusungaiselatankab.go.id</a>
15	PASAR ONLINE	Merupakan aplikasi / wadah untuk mendekatkan antara penjual dan pembeli secara daring	<a href="https://pasar.hulusungaiselatankab.go.id">https://pasar.hulusungaiselatankab.go.id</a>
17	MAPRES	Sistem aplikasi layanan mahasiswa berprestasi merupakan aplikasi layanan mahasiswa berprestasi adalah layanan informasi tentang pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://mapres.hulusungaiselatankab.go.id">https://mapres.hulusungaiselatankab.go.id</a>
18	SENADA	Sistem Informasi Inovasi Daerah merupakan aplikasi manajemen inovasi daerah kabupaten hulu sungai selatan	<a href="https://senada.hulusungaiselatankab.go.id">https://senada.hulusungaiselatankab.go.id</a>
19	SI PANDU WISATA	Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://sipandu.hulusungaiselatankab.go.id">https://sipandu.hulusungaiselatankab.go.id</a>
20	SIDAKAT	Sistem Informasi Database Komoditas Asal Tumbuhan merupakan aplikasi yang berisi informasi pengawasan dan produksi pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta informasi peraturan yang berkaitan dengan Pangan	<a href="https://sidakat.hulusungaiselatankab.go.id">https://sidakat.hulusungaiselatankab.go.id</a>
21	SIMBIOSIS	Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Olahraga Terintegrasi merupakan aplikasi / sistem informasi data olahraga dan pembinaan atlet di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://simbiosis.hulusungaiselatankab.go.id">https://simbiosis.hulusungaiselatankab.go.id</a>

22	SIM-PKB	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan bermotor merupakan aplikasi pengajuan pengujian kendaraan bermotor, serta manajemen dan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor	<a href="https://simpkb.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://simpkb.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
23	SiPAT KHUSUS	Sistem Informasi Pemetaan Aset Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://sipatkhusus.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://sipatkhusus.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
24	SISKA	Sistem Informasi data Perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	<a href="https://siska.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://siska.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
25	Corona	Sistem Informasi Informasi resmi Covid 19	<a href="https://corona.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://corona.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
26	Satu NIK	Aplikasi Data Kesehatan, Sosial, Pendidikan by Name by Address	<a href="https://satunik.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://satunik.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
27	Mapres	Aplikasi Pendaftaran Bantuan Mahasiswa Berprestasi Secara Online	<a href="https://mapres.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://mapres.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
28	JDIH	Aplikasi Jaringan Dokumentasi Hukum / Produk Hukum Daerah	<a href="https://jdih.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://jdih.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
29	ELPPD	Aplikasi Dokumen kelengkapan LPPD secara online	<a href="https://elppd.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://elppd.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
30	Si Open	Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa pagu dibawah 50 juta rupiah	<a href="https://siopen.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://siopen.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
31	Si MADU	Sistem Informasi Musrembang Terpadu	<a href="https://ekinerja.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://ekinerja.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>
32	Ekinerja	Aplikasi Kinerja Pegawai	<a href="https://simadu.hulusungaiselatan.kab.go.id">https://simadu.hulusungaiselatan.kab.go.id</a>

b) Service level agreement (SLA) Pusat Data Pemerintah Daerah

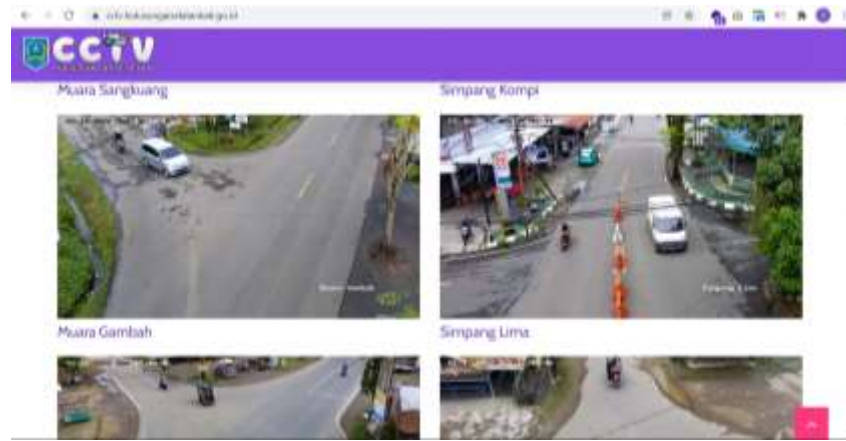
Capaian indikator Service level agreement (SLA) Pusat Data Pemerintah Daerah sebesar 99,691 % didapat dari jumlah aktif / dapat diakses server pada tahun 2021 selama 8733 Jam, dengan waktu downtime/ tidak aktif selama 27 Jam, waktu downtime/tidak aktif server dikarenakan Pemeliharaan fisik server selama 11 Jam, Konfigurasi perangkat lunak server selama 9 Jam, dan konfigurasi jaringan internet server selama 7 Jam.

c) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pusat data

Capaian 1 kegiatan adalah penyediaan alat kelengkapan server berupa KVM monitor untuk server

d) Jumlah Layanan Sistem Informasi Kota Cerdas

Layanan Sistem Informasi Kota Cerdas yang dibuat dan dikembangkan pada tahun 2021 sebanyak 1 layanan, yaitu layanan cctv public yang dapat diakses melalui situs <https://cctv.hulusungaiselatan.kab.go.id>, dengan tampilan situs sebagai berikut :



Gambar 3.4 Tampilan situs cctv public Pemkab HSS

e) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Data Aplikasi

Capaian Pelaksanaan Koordinasi Data Aplikasi sebesar 1 Kegiatan yaitu koordinasi aplikasi Surat / Kearsipan Elektronik dengan Arsip Nasional RI, dengan pelaksanaan tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi Srikandi / Kearsipan untuk keperluan surat menyura secara elektronik, yang dapat diakses melalui situs <https://srikandi.arsip.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.5 Tampilan layar depan aplikasi Srikandi

f) Jumlah Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler yang diawasi sesuai standar

Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler yang diawasi sesuai standar adalah kegiatan untuk memastikan Menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berfungsi dengan baik dan dalam kondisi dengan baik. Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler pada tahun 2021 adalah sebanyak jumlah seluler yaitu 100 kali kegiatan pengawasan. Adapun Menara Telekomunikasi Seluler yang ada di Kabupaten Hulu sungai selatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Menara Telekomunikasi Seluler yang ada di Kabupaten hulu Sungai Selatan

NO	ALAMAT MENARA	TITIK KOORDINAT		KECAMATAN	PEMILIK TOWER
		LINTANG SELATAN (SOUTH)	BUJUR TIMUR (EAST)		

1	Desa Bayanan / Jl Perindustrian	-2.6324444	115.1096111	Daha Selatan	Telkom/ Mitratel
2	Jl. Pelayar RT.02/I Desa Parigi	-2,63691	115,08762	Daha Selatan	Protelindo
3	Jl. Kandangan-Negara RT 03/II Desa Muning Tengah	-2,64834	115.12607	Daha Selatan	Protelindo
4	Jl. Sekolah Islam RT.01 RW.01 Desa Sungai Pinang	-2.6325555	115.1034722	Daha Selatan	CMI
5	Jl.Lingkar Selatan RT 04 RW II Tumbukan Banyu	-2.63525	115.1066388	Daha Selatan	Mitratel
6	Jl Parigi Habirau Tengah/Pelayar RT 01 RW 01	-2.6365277	115.0900277	Daha Selatan	Telkomsel
7	Dusun Samuda RT 8 RK IV	-2.6331666	115.0674722	Daha Selatan	Telkomsel
8	Desa Muning Baru	-2.6738055	115.1506666	Daha Selatan	Solusi Tunas Pratama
9	Jl Inpres RT.4/II DesaTumbukan Banyu	-2.6343333	115.105944	Daha Selatan	Protelindo
10	Jl. Banua Hanyar RT.05 RW.03	-2.629821	115.074551	Daha Selatan	Protelindo
11	Jl. Lingkar Selatan RT.002 RW.001, Desa Pihanin Raya	-2.6327777	115.1188888	Daha Selatan	Protelindo
12	Desa Baruh Kembang RT 004 RW 002	-2.62198	115.10472	Daha Utara	Solusi Tunas Pratama
13	Desa Teluk Labak	-2.5970555	115.1093888	Daha Utara	Mitratel
14	Jl. Tugu 2 Januari 1949 ( Desa Hamayung )	-2.5784722	115.1183333	Daha Utara	Protelindo
15	Dalam Desa Pakan Dalam RT.02/01 Desa Pakan Dalam	-2.6172222	115.1005555	Daha Utara	Tower Bersama Group
16	Jl. Pasungkan No.9/3 Desa Pasungkan	-2.6025	115.1030555	Daha Utara	Protelindo
17	Blok D4, Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur, Desa Bajayau	-2.63813	115.09326	Daha Barat	Mitratel
18	Jl. Siang Gantung RT.02/I Desa Siang Gantung	-2.6688055	115.0258888	Daha Barat	Protelindo
19	Jl. Baiturahim ( Jl. A.Yani RT 09/V Kel Kandangan Barat Parincahan	02°46'18.8"	115°15'84.9"	Kandangan	Persada Sokka Tama
20	Jl. Panglima Batur RT.017 LK. VIII, Kdgn Kota	-2,783032	115,267271	Kandangan	Infratech
21	Jl Muara Banta No.69 RT 03/I	-2,7898056	115,281111	Kandangan	Mitratel
22	Jl. Parindra Kelurahan Kandangan Utara	-2,7812500	115,266806	Kandangan	Epid Menara AssetCo

23	Desa Sungai Kupang, Bangkau	-2,7202500	115,225167	Kandangan	Mitratel
24	Jl. Singakarsa No. 48, Dusun Pandai Tengah RT. 01 RW. 01, Kel. Kandangan Barat	-2.78392	115.26194	Kandangan	Mitratel
25	Jl. Banyu Barau RT.10 LK.5, Kel Kandangan Barat	02°46'36.4"	115°15'79.2"	Kandangan	Mitratel
26	Jl. Alfalah RT.004, LK.02, Kel. Kandangan Kota	02°47'08.9"	115°16'35.7"	Kandangan	Mitratel
27	Jl. Kamboja RT.04 RW.2 Kel. Kandangan Kota	02°46'33.5"	115°16'00.4"	Kandangan	Mitratel
28	Desa Sungai Kupang RT.06 RK. III	02°43'18.1"	115°13'29.5"	Kandangan	Solusi Tunas Pratama
29	Jl. Jend Sudirman Desa Tibung Raya RT 4 RW II	02°47'51.4"	115°15'76.6"	Kandangan	Telkomsel
30	Jl. Singakarsa Kandangan Barat RT 4 RW 2	02°46'83.5"	115°15'55.8"	Kandangan	Telkomsel
31	Desa Bangkau RT 1 RW 1	02°41'13.3"	115°12'29.9"	Kandangan	Mitratel
32	Jl A Yani RT 1 RK 1 Gambah Luar Muka	02'45'25'6"	115'16'38.3"	Kandangan	Mitratel
33	Jl. Melati RT 14 RW 7 Kelurahan Kandangan Kota	02'46'56'3	115'16'16.6"	Kandangan	Telkomsel
34	Jl. Melati RT 14 RW 7 Kelurahan Kandangan Kota	-2.78272	115.271334	Kandangan	Telkom/Mitratel
35	Jl. Musyawarah RT.18 RW.IX Kelurahan Kandangan Kota	- 2,7820277 8	115,2646111	Kandangan	Protelindo
36	Jl. Jend. H.M. Yusi Kel. Kandangan Utara	-2,77993	115,27241	Kandangan	Protelindo
37	Jl. Hantarukung RT.02/I Desa Tibung Raya	-2,79014	115,26163	Kandangan	Protelindo
38	Jl. Batuah RT.05/III, Desa Tibung Raya	-2,79458	115,26063	Kandangan	Protelindo
39	Jl. Aluh Idut RT.09 LK.IV Kel. Kandangan Kota	-2,7839	115,27066	Kandangan	Protelindo
40	Jl. Zafri Zam-Zam RT.01 RW.01 Desa Bariang	-2.7635	115,27502	Kandangan	Protelindo
41	Jl. H. M. Yusi RT.004 RW.II, Desa Gambah Luar Muka	-2,78503	115,24693	Kandangan	Protelindo
42	Jl. Ganda RT. 008 RW.004, Desa Baluti	-2,80308	115,26879	Kandangan	Protelindo
43	Jl. Sungai Kupang RT.004 RW.002, Desa Sungai Kupang	-2,73738	115,23755	Kandangan	Protelindo
44	Jl. H. Jafri Zam-Zam RT.002 RW.001, Desa Amawang Kiri Muka	-2,78636	115,25809	Kandangan	Protelindo

45	Jl. Negara-Kandangan RT.003 RW.002, Desa Gambah Dalam	-2,81644	115,20914	Kandangan	Protelindo
46	Jl. A. Yani RT.11 LK.V Kel. Kandangan Barat	-2,7575	115,26116	Kandangan	Protelindo
47	Jl. Kerja Bakti Gang Damai RT.005 RW.002, Desa Baluti	02°47'31"	115°16'5"	Kandangan	Protelindo
48	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Gang Padang Baru RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota	02°47'26.1"	115°16'52.4"	Kandangan	TBG
49	Jl. Loksebaung RT.010 RW.005, Kelurahan Jambu Hilir	-2.802703	115,286597	Kandangan	Mitratel
50	Jl Panglima Batur (Gudang Toko Rita), Kelurahan Kandangan Kota	-2,783038	115,266271	Kandangan	Telkomsel
51	Jl. D.I. Panjaitan RT.03 RW.01, Desa Baluti	-2,790866	115,266942	Kandangan	Telkomsel
52	Jl.Panglima Batur No. 78B RT.011 RW.05, Kelurahan Kandangan Kota	-2,784747	115,267423	Kandangan	Telkomsel
53	Desa Ulin RT 3 RW II	02°47'26.6"	115°13'28.8"	Simpur	Telkomsel
54	Jl. Garunggang RT 02/01	02°48'50.3"	115°12'24.6"	Simpur	Tower Bersama Group
55	Jl. Buluh RT.05/I Desa Tebing Tinggi	-2,81724	115,19334	Simpur	Protelindo
56	Jl. Bukhari RT.002 RW.002 Desa Simpur	02°48'59.9"	115°12'42.0"	Simpur	Protelindo
57	Jl. Pajah Api RT.002 RW.I, Desa Kapuh	-2.80413	115,24144	Simpur	Protelindo
58	Jl. Bukhari RT.07 RW.01 Desa Wasah Hilir	02°48'33.8"	115°13'06.2"	Simpur	Protelindo
59	Jl. Abau RT.003/RW.002, Desa Ulin	02'47'28.50 "	115'13'17.70"	Simpur	Protelindo
60	Desa Sirih Kalumpang RT 02	-2,8211944	115,179111	Kalumpang	Protelindo
61	Jl Bukhari Km 14,5 (Depan Kantor Camat )	02°49'10.7"	115°09'59.9"	Kalumpang	Telkomsel
62	Desa Tambingkar RT.07 Dusun IV	02°49'24.2"	115°09'44.2"	Kalumpang	Protelindo
63	Jl Sudirman Sungai Raya Selatan RT.03 RW.II	-2,8385278	115,249722	Sungai Raya	Protelindo
64	Jl. Paring Agung RT.003 RW.002, Desa Paring Agung	-2,82885	115.23000	Sungai Raya	Mitratel
65	Jl. A.Yani RT.001 RW.001 Desa Ida Manggala	-2,86779	115,23537	Sungai Raya	Mitratel

66	Desa Sungai Raya Utara RT.4/8	-2,834139	115,251417	Sungai Raya	Solusi Tunas Pratama
67	Jl Sudirman (depan kantor camat), Desa Sungai Raya Selatan	02'50'24.7"	115'14'56.3	Sungai Raya	Telkomsel
68	Jl. A. Yani RT.04/II Desa Sungai Raya Utara	-2,83284	115,25151	Sungai Raya	Protelindo
69	Jl. Limau Manis RT.04/I Desa Hariti	-2,86329	115,24071	Sungai Raya	Protelindo
70	Jl. Murni RT.003 RW.002 Desa Hamalau	-2,80431	115,25922	Sungai Raya	Protelindo
71	Jl. Keramat RT.02 RW.02 Desa Hamalau	-2,805905	115,263567	Sungai Raya	Protelindo
72	Jl. Desa Baru RT. 004 RW. 002	02'50'11.1"	115'12'47.9"	Sungai Raya	TBG
73	Desa Sungai Kali RT. 001 RW. 001	-2.836440	115,213391	Sungai Raya	Mitratel
74	Jl A Yani KM 7 Bakarung/Bamban Utara (Muara Longawang) RT 02/01	02'44'37.6"	115'16'49.4	Angkinang	Mitratel
75	Desa Angkinang RT I RW 3, Dusun Lokdalam	02'43'18.4"	115'17'44.8	Angkinang	Telkomsel
76	Jl. Jend. A. Yani Km. 9,5 RT 1 Desa Angkinang	-2.72139	115,2962	Angkinang	Protelindo
77	Jl. Jend. A. Yani RT. 2 RW. 1 Desa Bakarung	-2.74328	115,28057	Angkinang	Protelindo
78	Jl. Ex Rel Kereta Api RT.01 RW.01 Desa Angkinang	-2.73222	115,28973	Angkinang	Protelindo
79	Desa Hamak Timur RT.02/01	02'47'10.7"	115'21'50.1"	Telaga Langsung	Mitratel
80	Desa Mandala RT.03 RW.II	- 2.7358611 1	115,335083	Telaga Langsung	Solusi Tunas Pratama
81	Desa Mandala Telaga Langsung RT 1 RW 1	02'44'11.0"	115'20'05.8	Telaga Langsung	Telkomsel
82	Padang Batung RT 02 RW 11	02'49'13.2"	115'18'01.2	Padang Batung	Protelindo
83	Jl. Gerilya RT.003, RW.002, Desa Karang Jawa Muka (Bilui)	-2.78037	115.2792	Padang Batung	Mitratel
84	Padang Batung RT.1 Desa Batu Bini	- 2.8268333 3	115,308194	Padang Batung	Solusi Tunas Pratama
85	Jl. Jembatan Merah/ Brigjen H.Hasan Basry KM 8.1	02'48'48.6"	115'17'40.9	Padang Batung	Mitratel
86	Desa Batu Bini RT 1 RK II	02'49'40.4"	115'18'35.0	Padang Batung	Telkomsel
87	Desa Karang Jawa RT.02 RK.01	- 2.7920555 6	115.2883888 9	Padang Batung	Protelindo



88	Desa Batu Bini RT.01/01	- 2.8329722 2	115,3277778	Padang Batung	XL Axiata
89	Jl. Babandangan RT.004 RW.002 Desa Pahampangan	-2.82842	115.27053	Padang Batung	Protelindo
90	Jl. Brigjend. Hasan Basery RT.004/RW.002, Desa Jembatan Merah	02'48'46.50 "	115'17'42.00"	Padang Batung	Protelindo
91	Desa Tabihi RT.02 RK.I	02°46'30"	115°16'55"	Padang Batung	Protelindo
92	Jl. H. Busra RT.02 RW.01, Desa Malutu	02°51'33"	115°17'3"	Padang Batung	Tower Bersama Group
93	Muara Hatip RT 03/02 Desa Hulu Banyu	-2,7933889	115,430444	Loksado	Epid Menara AssetCo
94	Jl. Loksado RT. 01/01 Desa Loksado	-2,7955280	115,490694	Loksado	Epid Menara AssetCo
95	Jl. Raya PKL-Manna Hulu Bunyu RT.02 RW.02 Hulu Bunyu	-2.79867	115.45141	Loksado	Mitratel
96	Desa Loksado RT.01 RW.01	-2.7957778	115.4918611 1	Loksado	Solusi Tunas Pratama
97	Halunuk/Jl. Niagara RT 1	02'4908'2"	115'22'00'3	Loksado	Mitratel
98	Hulu Banyu / Muara Hatip RT III RW II	02'47'35.5"	115'25'49.7"	Loksado	Telkomsel
99	Desa Loksado	02'47'46'0"	115'29'29.9"	Loksado	Mitratel
100	Lumpangi RT.02/01 Desa Lumpangi	-2.7945556	115,4297222	Loksado	XL Axiata



Gambar 3.6 Kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi Seluler

- 1.2 Capaian indicator Kegiatan dan sub kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten kota
- a) Jumlah perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah

Tabel 3.11 Perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Inspektorat
4.	Sekretariat Dewan
5.	Dinas Perhubungan
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Bridjen H. Hasan Basry Kandangan
9.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
10.	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika

- b) Jumlah menara selular yang beroperasi sesuai standar  
Menara selular yang beroperasi sesuai standar sebanyak 100 unit  
Menara sebgaiman pada tabel 3.6
- b) Capaian indikator Program Informasi Dan Komunikasi Publik sebagai berikut :
- a) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan keterbukaan Informasi Publik  
Capaian 66,67 persen merupakan perhitungan dari 26 PD yang melaksanakan KIP dibagi jumlah seluruh PD yaitu 39 PD
- b) Persentase Kegiatan Pemda yang diberitakan tepat waktu  
Capaian 100 persen merupakan perhitungan dari 1.145 berita kegiatan pemkab yang ditayangkan keseluruhannya tayang tepat waktu.
- 2.1 Capaian indikator kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- a) Jumlah website perangkat daerah yang mememuat informasi publik  
Capaian 26 website merupakan jumlah website PD yang terkelola dengan baik

Tabel 3.11 website perangkat daerah yang mememuat informasi publik

NO	SKPD	UPDATE	TIDAK UPDATE	TIDAK AKTIF
1	Website Pemkab HSS	√		
2	Sekretariat Daerah HSS	√		
3	Sekretariat DPRD	√		
4	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	√		
5	Bappelitbangda		√	
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	√		
7	Badan Penanggulangan Bencana		√	

8	Inspektorat		√	
9	Satpol PP & Damkar	√		
10	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	√		
11	Dinas Kesehatan		√	
12	Dinas PU & Tata Ruang		√	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan lingkungan hidup		√	
14	RSUD Brigjend H. Hasan Basry	√		
15	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	√		
16	Dinas Sosial	√		
17	Dinas Ketahanan Pangan			√
18	Dinas PPKBPPPA	√		
19	Disdukcapil	√		
20	Dinas Komunikasi dan Informasi	√		
21	Dinas PMPTS	√		
22	Dinas Perikanan		√	
23	Disnaker KUKM & Perindustrian	√		
24	Dinas PMD		√	
25	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		√	
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		√	
27	Dinas Pertanian		√	
28	Dinas Perhubungan	√		
29	Dinas Perdagangan	√		
30	Badan Kesbangpol			√
31	Kecamatan Sungai Raya		√	
32	Kecamatan Padang Batung		√	
33	Kecamatan Telaga Langsat		√	
34	Kecamatan Angkinang		√	
35	Kecamatan Kandangan		√	
36	Kecamatan Simpur	√		
37	Kecamatan Daha Selatan	√		
38	Kecamatan Daha Utara		√	
39	Kecamatan Daha Barat	√		
40	Kecamatan Kalumpang		√	
41	Kecamatan Loksado		√	

- b) Media Sosial perangkat daerah yang memuat informasi publik Capain 26 merupakan jumlah media sosial (facebook, youtube, instagram) PD yang dikelola dengan baik



Gambar 3.7 Website yang memuat informasi publik

- c) Persentase Laporan masyarakat melalui media elektronik yang ditanggapi tepat waktu  
 Capaian 100 persen merupakan hasil perhitungan jumlah laporan masyarakat yang masuk melalui media elektronik dan tertanggapi tepat waktu sebanyak 160 laporan dibagi jumlah keseluruhan laporan masyarakat yang masuk melalui media elektronik sebanyak 160 laporan.
- d) Persentase Laporan masyarakat melalui media elektronik yang ditanggapi tepat waktu  
 Angka 100 persen merupakan hasil perhitungan dari jumlah kegiatan pemkab yang diliput sesuai standar 1.145 kegiatan dibagi jumlah keseluruhan kegiatan pemkab sebanyak 1.145 kegiatan

2.1.1 Capaian sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten kota Program Informasi Dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Kegiatan Bupati Menjawab yang Dilaksanakan  
 Pada tahun 2021 kegiatan bupati menjawab yang telah dilaksanakan 48 Kegiatan Bupati Menjawab
- b) Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli untuk Memenuhi Standar Minimal Broadcasting  
 Capaian 6 jumlah paket alat studio visual yang diadakan sebagai sarana pendukung untuk memenuhi standar minimal broadcasting
- c) Jumlah Perangkat Daerah Yang Sudah Melaksanakan Urusan KIP Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku  
 Capaian 27 PD yang telah melaksanakan urusan KIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan salah satu indikatornya melaksanakan pengelolaan website dan media sosialnya dengan baik
- d) Jumlah Website Perangkat Daerah yang di Monitoring  
 capaian 26 website PD yang telah dimonitoring dan dibantu pengelolaannya oleh tenaga pengelola IT medsos Dinas Kominfo



Gambar 3.8 Website yang di monitoring

- e) Jumlah Kegiatan Dialog Pembangunan yang Terlaksana  
Capaian 2 kegiatan dialog pembangunan yang telah dilaksanakan
- f) Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Terpublikasi  
Capaian 1.145 informasi merupakan jumlah informasi publik kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasi
- g) Jumlah Kerja Sama Dengan Mitra Siaran Sebagai Media Komunikasi Publik  
Capaian 17 kerjasama merupakan jumlah kerjasama dengan 17 TV Kabel di HSS sebagai mitra siaran dan media komunikasi publik
- h) Jumlah Media Elektronik Mitra Strategis yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dan Nasional  
Capaian 12 media merupakan jumlah media elektronik mitra strategis yang telah bekerjasama mendukung pemkab HSS dalam melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas daerah juga nasional



Gambar 3.9 Website Media Elektronik Mitra Strategis yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dan Nasional

- i) Jumlah Jurnalis Mitra Kerja Yang Terlayani  
Capaian 10 jurnalis merupakan jumlah jurnalis dari 10 media mitra kerja yang terlayani sebagai tenaga editing berita
- j) Jumlah Liputan berita Terpublikasi  
Capaian 1.145 liputan merupakan jumlah liputan berita yang telah dilaksanakan oleh tenaga peliput dan tenaga editing Dinas Kominfo serta terpublikasi baik di media cetak maupun di media elektronik
- k) Jumlah Media Cetak Mitra Strategis Yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan Dan Program Prioritas Nasional  
Capaian 5 media merupakan jumlah media cetak mitra strategis yang mendukung diseminasi informasi dan kebijakan dan program prioritas daerah maupun nasional.



Gambar 3.10 Media Cetak Mitra Strategis Yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan Dan Program Prioritas Nasional

- c) Capaian indikator Program penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupatenkota sebagai berikut :
  - a) Persentase Ketersediaan Data Sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia  
Capaian Ketersediaan Data Statistik Sektoral sesuai prinsip SDI sebanyak 31,75 persen yaitu 62 data statistic sektoral yang tersedia dari jumlah standar statistic sektoral kabupaten sebanyak 197 Data.

3.1 Capaian Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten kota pada Program penyelenggaraan statistik sektoral adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Produsen data sesuai SDI  
Merupakan Keaktifan Perangkat Daerah dalam menjalankan perannya sebagai Produsen data, pada tahun 2021 semua perangkat daerah / 39 Perangkat daerah aktif dalam menjalankan peran sebagai produsen data.
- b) Jumlah Sistem informasi Data Statistik sesuai SDI  
Pada tahun 2021 dikembangkan Sistem informasi Data Statistik sesuai SDI yaitu portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan alamat situs <https://satudata.hulusungaiselatankab.go.id>



3.11 Gambar portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### 3.1.1 Capaian Sub Kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten kota pada Program penyelenggaraan statistik sektoral

#### a) Jumlah Pelatihan Statistik Sektoral

Pada tahun 2021 dilaksanakan 1 (satu) kali Pelatihan Produsen Data untuk Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara daring.



Gambar 3.12 Pelatihan Produsen Data untuk Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### b) Jumlah dokumen HSS dalam angka, Kecamatan dalam angka dan Statistik daerah

Pada tahun 2021 di Cetak 3 jenis Buku statistik yaitu Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Statistik Daerah yang dibagikan ke setiap kantor camat dan instansi vertical lainnya.



Gambar 3.13 Buku statistik yaitu Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Statistik Daerah

4. Capaian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a) Persentase tata kelola Keamanan Informasi yang dilaksanakan dengan status baik  
capaian untuk jumlah 60 data atau informasi dalam kondisi aman.

4.1 Capaian indikator Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupatenkota pada Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a) Jumlah layanan Keamanan informasi sesuai standar

Tabel 3.12 Layanan keamanan informasi

NO.	LAYANAN
1	identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik
2	penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
3	perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi
4	peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian
5	konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan

- b) Jumlah sarana dan prasarana SOC

Capaian pada tahun 2021 yaitu Penyediaan layanan pembuatan sertifikat elektronik

5. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 100% atau jumlah 27 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan.

Tabel 3.13 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

	Nama Dokumen	Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2020	1 dokumen
4	Renja 2020 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2020	1 dokumen
6	PK Murni 2020 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2020 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen



8	Rencana Aksi 2020	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2020	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2020	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>15 dokumen</b>

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan IV sebanyak 12 Dokumen sesuai dengan target.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Tabel 3.14 Dokumen Keuangan

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Tahunan (CALK)	1 dokumen
<b>Jumlah</b>		<b>12 dokumen</b>

#### D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 10.611.479.312,- dari pagu Rp. 13.047.520.802,- atau sebesar 81,33 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran

NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN		DEVIASI ANGGARAN (%)
		Rp.	%	
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	4.000.000	66,67	33,33
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.125.000	675.000	60,00	40,00
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.420.194.352	2.196.269.578	90,75	9,25
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.500.000	33.406.000	63,63	36,37

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.122.600	74,84	25,16
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.125.000	1.023.600	90,99	9,01
Sub Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.125.000	900.000	80,00	20,00
<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.257.100	2.257.100	100,00	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.100.000	27.100.000	100,00	-
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.807.600	41.040.600	72,24	27,76
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.388.000	13.945.800	96,93	3,07
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000	12.530.000	92,81	7,19
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.175.000	171.898.220	95,94	4,06
<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225.000	156.000	69,33	30,67
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	606.320.000	224.317.238	37,00	63,00
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.357.750	22.060.950	87,00	13,00
<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.027.000	51.080.337	68,08	31,92
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.800.000	12.980.000	94,06	5,94
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.644.000	18.097.200	92,13	7,87
<b>Program: Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>				
<b>Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	31.200.000	30.750.000	98,56	1,44
Sub Kegiatan: Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	10.745.000	-	-	100,00

Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	513.516.000	481.951.829	93,85	6,15
Sub Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik	71.400.000	71.400.000	100,00	-
Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	493.400.000	460.500.000	93,33	6,67
Sub Kegiatan: Layanan Hubungan Media	180.000.000	165.000.000	91,67	8,33
Sub Kegiatan: Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	284.000.000	167.525.180	58,99	41,01
Sub Kegiatan: Manajemen Komunikasi Krisis	50.750.000	47.700.000	93,99	6,01
Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	424.082.000	390.801.000	92,15	7,85
Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	36.000.000	28.500.000	79,17	20,83
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.700.000.000	1.667.500.000	98,09	1,91
<b>Program: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	45.789.000	44.799.000	97,84	2,16
Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	29.028.000	21.878.000	75,37	24,63
<b>Program: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>				
<b>Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.210.400.000	1.941.464.474	87,83	12,17
<b>Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.528.800.000	1.024.544.722	67,02	32,98
Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.155.320.000	1.062.150.000	91,94	8,06
Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	605.800.000	601.318.525	99,26	0,74
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	100.000.000	39.822.000	39,82	60,18

Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	60.120.000	48.831.000	81,22	18,78
<b>Jumlah</b>	<b>13.047.520.802</b>	<b>10.611.479.312</b>	<b>81,33</b>	<b>18,67</b>

#### E. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlihat bahwa dari 4 (empat) sasaran yang ada, sebanyak 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian yang sama dengan target, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	92,57	83,85	11,72
2		Persentase Desa yang bebas blankspot	100	83,85	16,15
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial	100	90,83	9,17
4		Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman	100	-	100

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Efisiensi anggaran tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara IKU yang mempunyai capaian kinerja 100% atau lebih dan anggaran program yang mendukung IKU tersebut secara langsung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media sosial dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan efisiensi sebesar 9,17%. Diperoleh dari perbandingan capaian IKU dan Program yang mendukungnya. Dengan rincian Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 92,53%, sehingga tingkat efisiensi pada program tersebut sebesar 7,47%. Dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran 89,12%,

sehingga tingkat efisiensi pada program tersebut sebesar 9,17%. Efisiensi pada program ini didapat karena banyaknya kegiatan yang bisa diakan secara daring sehingga mengurangi anggaran untuk makan minum dan alat tulis untuk bahan kegiatan.

2. Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman dengan capaian kinerja sebesar 100%, Efisiensi pada program ini didapat karena banyaknya kegiatan yang bisa diakan secara daring sehingga mengurangi anggaran untuk makan minum dan alat tulis untuk bahan kegiatan.

## **F. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2020**

### **F.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2020**

Dari hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, bahwa penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra belum sepenuhnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangkamenengah.
2. Target kinerja yang ditetapkan telah selaras dengan target kinerja pada RPJMD.
3. Dokumen Renstra belum menyajikan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Tujuan Sasaran dalam RPJMD.
4. Dokumen Renstra belum menyajikan Indikator Kinerja Utama baik IKU Pemerintah Daerah maupun IKU Unit Kerja, begitu pula dengan Dokumen Perencanaan Kinerja.
5. Dokumen perencanaan kinerja belum memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan/target jangka pendek.
6. Dokumen perencanaan belum selaras dengan dokumen Renstra dan dokumen perencanaan kinerja di atasnya.
7. Dokumen perencanaan belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja).
8. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penetapan kinerja yang dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
9. Indikator Kinerja Utama Unit Kerja belum selaras dan belum merupakan breakdown dari IKU Pemerintah Daerah.
10. Format penyajian Indikator Kinerja Utama SKPD belum sesuai dengan ketentuan.
11. Pelaporan Kinerja belum dapat menyajikan capaian kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pelaporan belum dapat diandalkan.
12. Pelaporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

13. Informasi yang disajikan dalam Pelaporan Kinerja belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
14. Pelaporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan per program dan belum mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome). Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja yang dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward and punishment.
15. Belum disajikannya evaluasi terhadap masing-masing program, yang hasilnya berupa kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi serta belum tersajinya rekomendasi untuk ditindaklanjuti serta perencanaan kedepannya yang tersaji dalam Action Plan (Rencana Aksi per triwulan).
16. Rata-rata capaian kinerja (Outcome) untuk Tahun 2020 belum tersajikan dalam Pelaporan Kinerja.

#### F.1. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen penyesuaian renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah yang selaras dengan target kinerja pada RPJMD.
2. Menyusun Dokumen Renstra yang menyajikan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Tujuan Sasaran dalam RPJMD, serta menyajikan Indikator Kinerja Utama baik IKU Pemerintah Daerah maupun IKU Unit Kerja, begitu pula dengan Dokumen Perencanaan Kinerja.
3. Menyusun Dokumen perencanaan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja).
4. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Serta memperkuat Koordinasi antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Telah menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja belum selaras dan belum merupakan breakdown dari IKU Pemerintah Daerah dengan format penyajian yang sesuai dengan ketentuan.
6. Menyusun Pelaporan Kinerja yang menyajikan Rata-rata capaian kinerja (Outcome), capaian kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan, menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi secara keseluruhan, dapat digunakan

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta menyajikan informasi keuangan per program dan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome) dan menyajikan evaluasi terhadap masing-masing program, yang hasilnya berupa kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi rekomendasi untuk ditindaklanjuti serta perencanaan kedepannya

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang sesuai target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2020. Dengan capaian kinerja keuangan belanja sebesar 81,33% . Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten hulu Sungai Selatan Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya 100% yaitu Persentase Desa yang bebas blankspot, Persentase Berita Positif Pemkab HSS di media cetak, media elektronik dan media social, dan Persentase Data dan atau Informasi Pemerintah Daerah dalam kondisi aman.
- 2) Terdapat 1 (satu) indikator kinerja tercapai kurang dari 100% yaitu Indeks SPBE yaitu dengan capaian sebesar 92,27%.

### **B. Tindak Lanjut**

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh yang merupakan langkah untuk mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan saransaran/rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur secara berkala (per triwulan);
- 2) Untuk peningkatan akses internet Desa dilakukan dengan cara mengusulkan peningkatan akses jaringan ke penyedia jasa Telekomunikasi maupun ke BP3TI untuk BTS program KPU/USO.
- 3) Untuk peningkatan akses internet OPD perlu dibangun penambahan jaringan e-government secara berkelanjutan untuk seluruh OPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi public serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD.
- 4) Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.



- 5) Peningkatan peran aktif Masyarakat dalam penyebarluasan informasi melalui berbagai media berbasis teknologi informasi dengan semakin meningkatnya akses telekomunikasi dan akses internet di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 6) Perlunya sosialisasi maupun bimbingan teknis berkelanjutan dalam bidang TIK baik untuk aparatur pemerintah, siswa maupun asyarakat.
- 7) Perlunya peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 8) Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/ organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.